

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Stunting menjadi episode Panjang masalah Kesehatan balita di Indonesia. Stunting merupakan suatu kondisi gagal tumbuh kembang pada anak balita di bawah lima tahun yang di sebabkan kekurangan gizi kronis yang mengakibatkan tubuh anak menjadi pendek tidak sesuai dengan seusianya. Kekurangan gizi biasanya terjadi sejak bayi didalam kandungan dan pada masa awal setelah bayi lahir, Namun kondisi stunting baru akan terlihat ketika bayi berusia 2 tahun<sup>1</sup>. Namun, pola asuh dan pengetahuan gizi yang mengasuh juga sangat penting dalam pencegahan stunting pada anak balita. Intervensi yang paling menentukan untuk dapat mengurangi prevelensi stunting adalah intervensi yang dilakukan pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Dengan demikian periode 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) menjadi hal penting dan harus mendapat perhatian khusus karena menjadi penentu tingkat pertumbuhan fisik, kecerdasan, dan produktivitas seseorang di masa depan.

Berdasarkan survei status gizi Indonesia (SSGI) pada periode 2019-2022 angka stunting menurun pada tahun 2022 angka stunting turun menjadi 1,2% dari tahun sebelumnya 17,6%. Angka ini susut sangat jauh dari kondisi dari tahun 2019 yang 20,1% bila di rata-ratakan pada kurun 2019-2022 angka stunting di Indonesia menurun 2,3% per tahun. Sedangkan angka stunting pada tahun 2023 sudah berada pada 15,3%. Stunting menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Indonesia yang harus di selesaikan dari tingkat local regional hingga nasional. Di Indonesia pada tahu 2017 pemerintah melalui badan kependudukan dan keluarga berencana nasional (BKKBN) menjadi strategis dengan Rencana Aksi Nasional percepatan penurunan angka stunting (RAN PASTI) untuk mencapai target penurunan stunting hingga 14% pada tahun 2024<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> E. Yuliawati, F. T. Veriyani, and S. Khotimah, "Pencegahan Stunting dengan Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Secara Eksklusif," vol. 2, no. 6, pp. 516-524, 2022, doi: 10.25008/altifani.v2i6.299.

<sup>2</sup> Ibid 516-524

Program ini di prioritaskan pada penanganan gizi spesifik dan sesnsitif pada seribu hari pertama dalam kehidupan sampai dengan anak usia 6 tahun. Adapun kebijakan yang di tetapkan oleh pemerintah mengenai masalah stunting (Siswati,2018) diantaranya adalah RPJPN 2005-2025, rencana RPJM 2015-2019, Permenkes No.23/2014 Tentang Upaya Perbaikan Gizi, Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) 2016-2019, dan Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tahun 2015-2019<sup>3</sup>.

Pada tahun 2019 kecamatan yang mengalami stunting yakni kecamatan Tigo Nagari, Kecamatan Panti, Kecamatan Duo Koto, Kecamatan Mapatunggul Selatan, Kecamatan Padang Gelugur, Kecamatan Rao Utara, Kecamatan Bonjol, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kecamatan Mapatunggul, Kecamatan Rao Utara, dan Kecamatan Simpati. Sedangkan di 2020 meliputi 10 Kecamatan yakni Kecamatan Tigo Nagari, Kecamatan Panti, Kecamatan Mapatunggul Selatan, Kecamatan Bonjol, Kecamatan Rao, Kecamatan Rao Utara, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kecamatan Mapatunggul, Kecamatan Rao, Kecamatan Simpati, dan Kecamatan Duo Koto.

Selanjutnya 2018, kasus stunting berjumlah 26,9 persen, dengan total 4.761 balita di enam Kecamatan antara lain Tigo Nagari, Kecamatan Panti, Kecamatan Duo Koto, Kecamatan Mapatunggul Selatan, Kecamatan Bonjol dan Kecamatan Rao Utara. Usia stunting bagi balita dari 0-5 tahun, usia terbanyak mengalami stunting berumur 2 tahun. Penurunan angka stunting di sebabkan dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) termasuk makan dengan suplemen bergizi oleh ibu hamil dan balita. Selain PHBS, pihak Dinas Kesehatan setempat, Puskesmas, dan Bidan Desa juga ikut melakukan pencegahan penurunan angka stunting. Pencegahan stunting itu berupa, edukasi gizi seimbang seperti pemberian makanan tambahan biscuit, susu untuk ibu hamil dan balita, kelas ibu hamil, kelas ibu balita, ku jungan balita di posyandu dan lainnya.

---

<sup>3</sup> H. J. Kristina, C. Doaly, and A. Panny, Partisipasi Perawatan Bumi Rumah Kita Bersama, no. May. 2021. doi: 10.13140/RG.2.2.14678.16968.

Mengingat dampak stunting pada balita dapat menyebabkan terlambatnya pertumbuhan fisik, perkembangan mental, rendahnya status prestasi sekolah yang buruk, tingkat Pendidikan dan pendapatan yang rendah serta rentan menderita penyakit tidak menular. Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Pasaman hingga pada tingkat Kecamatan, Puskesmas dan Masyarakat<sup>4</sup>.

Dalam rangka menurunkan angka stunting di Kabupaten Pasaman Pemerintah Kabupaten Pasaman membentuk suatu kebijakan dengan mengeluarkan Peraturan Bupati No 24 Tahun 2019 dengan Inovasi Cegah Stunting Dengan Pintar, Adapun yang dimaksud dengan slogan (PINTAR) ialah (Periksa kehamilan di Tenaga kesehatan, Ingat tablet tambah darah untuk ibu hamil dan remaja, Nutrisi yang cukup dengan gizi seimbang, Tuntaskan ASI eksklusif sampai bayi berusia enam bulan, Ayo imunisasi balita secara lengkap gunakan jambat yang sehat, Rutin ke posyandu untuk pantau perkembangan balita.) Mengingat bahwa kejadian Stunting pada balita masih banyak terjadi di Kabupaten Pasaman sehingga dapat menghambat upaya peningkatan Kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Pasaman.

Berdasarkan Prevelensi Stunting Kabupaten Pasaman di akhir tahun 2022 turun menjadi 16,8 persen dari sebelumnya 17,6 persen tahun 2021. Capaian tersebut harus mendorong seluruh pihak terkait untuk terus mengencangkan upaya penurunan stunting hingga pencapaian angka lebih besar. Meskipun belum terlalu besar namun usaha itu menjadi motivasi bagi kader untuk berupaya lebih baik dilapangan<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> S. S. Anggriani, W. A. Triyanto, and D. L. Fithri, "Sistem Informasi Pemberian Bantuan Sosial Di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (P3Ap2Kb) Kabupaten Kudus Berbasis Web Menggunakan Notifikasi Sms," *Indones. J. Technol. Informatics Sci.*, vol. 2, no. 1, pp. 22-26, 2020, doi: 10.24176/ijtis.v2i1.5645.

<sup>5</sup> F. D. Ramadhani, "Analisis Faktor Risiko Stunting Pada 1000 Hari Pertama Kehidupan di Puskesmas Seberang Padang Kota Padang Tahun 2019," Tesis, pp. 1-162, 2019.

Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Pasaman. Untuk pencegahan angka stunting hingga ke tingkat Kecamatan dan daerah yang menjadi lokus lokus stunting di Kabupaten Pasaman salah satu upaya yang dilakukan Pemerintahan adalah melakukan kegiatan Sosialisasi dan terus melakukan edukasi kepada masyarakat langsung yang menjadi lokus lokus stunting di Kabupaten Pasaman dan penekanan angka stunting di angka 14 persen pada tahun 2024. Dari pelaksanaan sosialisasi komunikasi informasi dan edukasi Program Bangga Kencana di Kabupaten Pasaman terbukti mampu menurunkan angka kasus balita gagal tumbuh. Keberhasilan ini di apresiasi oleh pemerintah Kabupaten Pasaman karena pihaknya mampu menurunkan angka prevalensi stunting di Kabupaten Pasaman<sup>6</sup>.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Perumusan masalah yang akan dibahas sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka perumusan masalah yang dibahas yaitu :

Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Cegah Stunting Dengan Pintar di Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini dibuat yaitu untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Pasaman Nomor 24 Tahun 2019 tentang Cegah Stunting Dengan Pintar yang sudah dibuat Pemerintah Kabupaten Pasaman sesuai dan sudah terlaksanakan dengan baik atau belum terlaksanakan dengan baik.

---

<sup>6</sup> E. Doy. E. T. Ngura, and E. Ita, "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Stunting Pada Anak Usia Dini Di Kabupaten Ngada," *J Citra Pendidik.*, vol. 1, no. 1, pp. 136-150, 2021, doi: 10.38048/jcp.v1i1.167.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dibuat maka didapatkan manfaat secara teoritis maupun praktisi yaitu :

##### 1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat sebagai referensi serta informasi tertulis mengenai Implementasi Peraturan Bupati Nomor Kabupaten Pasaman Nomor 24 Tahun 2019 Dalam Cegah Stunting Dengan Pintar Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman.

##### 2. Secara Praktis

- a. Untuk Dinas Kesehatan Penelitian ini dapat menjadi evaluasi bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman dalam peningkatan percepatan penurunan Stunting di Kabupaten Pasaman.
- b. Untuk Masyarakat dapat di jadikan sebagai informasi dan edukasi terkait pencegahan Stunting sehingga dapat memastikan anak memakan sayur buah yang sehat serta mencukupi asupan gizi sejak anak dalam 1000 hari kehidupan.
- c. Untuk Peneliti manfaat yang di dapatkan peneliti dari penelitian ini yaitu pengetahuan dan pengalaman baru terkait kebijakan Pemerintah dalam pecegahan Stunting. Selanjutnya akan di dapatkan Peneliti Yaitu penelitian ini jadi syarat mendaptkan gelar sarjana di lingkup FISIP UISU.
- d. Untuk FISIP UISU penelitian ini dapat dimanfaatkan dalam mengembangkan materi pengajaran, mendukung pengabdian masyarakat dan meningkatkan reputasi Fakultas melalui dari hasil penelitian yang berpengaruh terhadap Masyarakat luas.

## **BAB II**

### **KERANGKA TEORI**

#### **2.1 Teori Penelitian**

Teori penelitian merupakan serangkaian konsep, asumsi, definisi, konstruk, dan juga prosesi untuk menjelaskan sebuah fenomena social secara sistematis dengan merumuskan hubungan antar variable. Teori penelitian juga merupakan salah satu hal penting di dalam sebuah penelitian. Kajian teori yang berkualitas juga akan menentukan kualitas dari sebuah penelitian yang dibuat. Teori penelitian seharusnya mengadopsi minimal satu teori yang mendasar yang memang berkaitan dengan topik penelitian. Selain itu, teori penelitian seharusnya dapat menjawab hipotesis dan juga memberikan jawaban sementara yang sudah disusun.

Labovitz dan Hagedorn berpendapat bahwa teori penelitian merupakan sebuah ide yang bersifat teoritis guna menentukan alasan mengapa variable dalam sebuah penelitian bisa saling berhubungan dengan pernyataan.

Berdasarkan uraian di atas maka teori yang di pakai peneliti pada penelitian ini yaitu:

##### **2.1.1 Pengertian Implementasi**

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Secara sederhana implementasi dapat juga diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Browne dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman,2004:70) mengemukakan bahwa implementasi adalah suatu perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.

Van Meter dan Van Horn (dalam Wahab2006:65) mengatakan bahwa implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintahan atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Sebenarnya kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem.

Mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan atau norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan tertentu<sup>7</sup>.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan public, ada dua pilihan Langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan public tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sector public. Kebijakan diturunkan proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun Kerjasama pemerintah dengan masyarakat<sup>8</sup>.

Menurut Daniel A Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) Sebagaimana dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab (2008 : 65) mrngatakan bahwa Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian<sup>9</sup>.

---

<sup>7</sup> R. M. R. M. Febianal. "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung," vol. 3, no. 1, pp. 114-124, 2019,

<sup>8</sup> N. Asiah, A. A. Sihabudin, D. Yuliani, U. Galuh, and S. I. Desa, "Rancang Bangun Aplikasi Inventaris Berbasis Website Di Desa Imbanagara Raya," Unigal, vol. 1, no. 1, pp. 2484-2492, 2022.

<sup>9</sup> A. R. Mening Subekti, Muslih Faozanudin, "Implementasi Program Bantuan Operasional Dasar Negeri Di Kecamatan Tambak," LIPA - Indones. J. Public Adm., vol. 3, no. 2, pp. 58-71, 2017

Menurut George C. Edward III Berpendangan bahwa Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yaitu :

- a. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran (*terget group*), Sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
- b. Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, Misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
- c. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau prespektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan menjadi efektif.
- d. Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan, Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure (SOP)* dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu Panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape* yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel<sup>10</sup>. Struktur birokrasi sangat berpengaruh dalam sebuah kebijakan sehingga implementasi kebijakan harus dibarengi dengan struktur birokrasi yang baik.

---

<sup>10</sup> K. M. Lumempow and S. Sambiran, "33996-71551-1-Sm," J. Gov., vol. 1, no. 1, pp. 1-8, 2021,



Menurut pandangan Edwards (dalam Budi Winarno, 2008 : 181) sumber sumber yang penting meliputi, staff yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik<sup>11</sup>. Struktur Birokrasi menurut Esdwards terdapat dua karakteristik utama,yakni :

*Standard Operating Procedures (SOP)* dan Fragmentasi : *SOP* atau prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari para pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam berkerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas<sup>12</sup>. Sedangkan fragmentasi berasal dari tekanan-tekanan diluar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite legislative, kelompok-kelompok kepentingan pejabat-pejabat eksekutif, konsitutasi negara dan sifat kebijakan yang memengaruhi organisasi birokrasi pemerintah.

Menurut pandangan Edward III (Budi Winarno, 2008: 175-177) proses komunikasi kebijakan dipengaruhi tiga hal penting, yaitu :

- a. Faktor pertama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah tranmisi. Sebelum pejabat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan.
- b. Faktor kedua adalah kejelasan, jika kebijakan-kebijakan diimplmentasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas. Sering kali intruksi-instruksi yang diteruskan kepada pelaksana kabur dan tidak menetapkan kapan dan bagaimana suatu program dilaksanakan.

---

<sup>11</sup> D. I. Desa and M. Jamili, "Implementasi Peraturan Bupati Barito Timur," vol. 1, no. 1, pp. 1-14, 2017.

<sup>12</sup> A. Manongga and Dkk, "Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Kelurahan Pinokalan Kota Bitung." J Jur. Ilmu Pemerintah., vol. 1, no. 1, pp. 1-10, 2018.

- c. Faktor ketiga adalah konsistensi, jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Walaupun perintah-perintah yang disampaikan kepada pelaksana kebijakan jelas, tetapi bila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik<sup>13</sup>.

Menurut Merilee S.Grindle (dalam Subarsono, 2011 : 93) Implementasi dipengaruhi oleh dua variable besar yaitu isi kebijakan (*content pf policy*) dan lingkungan implementasi (*contex of implementation*)<sup>14</sup>. Variable tersebut mencakup: sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau *terget group* termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh *terget group* termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh *target group*, sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai. Wibawa mengemukakan model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan transformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut :

- a. Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
- b. Derajat perubahan yang diinginkan.
- c. Kedudukan pembuat kebijakan.
- d. (Siapa) pelaksana program.
- e. Sumber daaya yang dihasilkan

---

<sup>13</sup> T. Y. Muhtadi, "Implementasi Kebijakan Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Di Kota Tangerang," J. Penelit. Dan Karya Ilm., vol. 20, no. 2, pp. 188- 197, 2020, doi: 10.33592/pelita.vol20.iss2.821.

<sup>14</sup> E. Herliani, K. Endah, and R. R. Garis, "Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Dalam Pembangunan Fisik Di Desa Hegarwangi Kecamatan ...," pp. 1770-1783, 2022.

Sementara itu, konteks implementasinya adalah :

- a. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi actor yang terlibat.
- b. Karakteristik lembaga dan penguasa.
- c. Kepatuhan dan daya tanggap.

Keunikan dari model Grindle terletak pada pemahamannya yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan antar para aktor implementasi, serta kondisi-kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan<sup>15</sup>.

1. Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Menurut Mazmanian dan Sabatier (dalam Subarsono. 2011: 94) ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni :

- a. Karakteristik dari masalah (tractability of the problems)
- b. Karakteristik kebijakan/undang-undang (ability of statute to structure implementation)
- c. Variabel lingkungan (nonstatutory variables affecting implementation).

2. Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

Mengemukakan ada lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni :

Standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana dan kondisi social ekonomi dan politik.

Berdasarkan etimologi implementasi kebijakan terdiri dari dua kata yakni implementasi dan kebijakan. Sehingga dapat di terjemahkan bahwa implementasi sebagai rangkai dari sebuah kegiatan maupun Tindakan dalam pelaksanaan yang telah di direncanakan serta d susun seecara matang dan terperinci dengan baik.

---

<sup>15</sup> Haerul, H. Akib, and Hamdan, "Implementasi Kebijakan Program Makassar Tidak," J. Adm. Publik, vol. 6, no. 2, pp. 21-34, 2016.

Sedangkan kebijakan yaitu sebuah peraturan yang di buat untuk mencapai tujuan tertentu atau rangkain keputusan yang mengandung konsukuensi moral yang didalamnya adanya keterikatan akan kepentingan rakyat banyak keterikatan terhadap tanah air atau tempat di mana yang bersangkutan berada. Sederhananya Implementasi Kebijakan merupakan suatu penerapan kebijakan yang pada dasarnya dibuat agar dapat dilaksanakan. Banyak faktor yang dapat memengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan.

Implementasi kebijakan sangat penting dibutuhkan mengingat tahapan-tahapan kebijakan publik meliputi empat tahapan evaluasi kebijakan, dan tahapan dampak evaluasi kebijakan. Apabila Implementasi Kebijakan tidak dilaksanakan maka kebijakan tidak akan diterapkan sebagaimana mestinya. Begitu sebaliknya jika suatu implementasi kebijakan dilaksanakan maka masyarakat akan mengikuti arahan sesuai dengan kebijakan public yang di buat. Dari pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa sebuah implementasi kebijakan sangat penting dalam kebijakan publik.

Implementasi Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2019 dalam Cegah Stunting Dengan Pintar telah ditetapkan dan diberlakukan diwilayah Kabupaten Pasaman. Degan ini dapat dikaji perlamerter keberhasilan Implementasi Kebijakan dari Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman. Dalam mengukur keberhasilan, peneliti menggunakan Teori Implementasi Kebijakan George Edwards III. Untuk menggambarkan variable atau faktor-faktor yang berpengaruh penting terhadap implementasi kebijakan public serta guna penyederhanaan pemahaman, didalam model-model implementasi kebijakan. Dalam Widodo (2010:96) menurut George Edward III terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu faktor :

- a. Komunikasi (Communication), menjadi penting dalam implementasi kebijakan dikarenakan sebagai sarana peyampaian informasi. Penyampaian Informasi dari atas kebawah maupun dari bawah keatas.
- b. Sumber Daya (Resources), maksud dari sumber day aini yaitu segala sumber pendukung dalam suatu implementasi kebijakan sehingga dengan adanya sumber daya tersebut implementasi kebijakan akan berjalan. Sumber daya yang

dimaksud bukan hanya sumber daya manusia saja tetapi sumber daya yang lainnya, sebagaimana mencakup :

- a) Staf pemangku kebijakan yang jumlahnya relative banyak. Masing masing dari mereka memiliki peranan penting dalam mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.
  - b) Sumber informasi yang relevan untuk keperluan terhadap implementasi kebijakan.
  - c) Wewenang pemerintah dan para stakeholder selaku implementor untuk melaksanakan kebijakan.
  - d) Dukungan dari lingkungan untuk mensukseskan implementasi kebijakan.
- c. Sikap (Disposition or Attitude), berhubungan dengan para implementor kebijakan dalam melaksanakan suatu kebijakan yang telah dibuat, Sikap para implementor menentukan sejauh mana kebijakan. Seorang implementor juga memiliki Tindakan inisiatif agar dapat tercapainya sebuah kebijakan meskipun Tindakan inisiatif tergantung pada besaran wewenang dan pengaruh yang dimiliki implementor.

Faktor yang menjadi perhatian Edward III di dalam Agustinus (2006:159-160) mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari :

- a) Pengangkatan birokrasi. Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Oleh karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah diterapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.
- b) Insentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan manipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka manipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi Tindakan para pelaksana menjalankan perintah dengan baik.

- d. Struktur Birokrasi merupakan suatu kebijakan yang akan melibatkan Lembaga atau organisasi perangkat daerah (OPD) dalam pelaksanaan implementasi kebijakan, maka perlu adanya kesesuaian struktur birokrasi, pembagian prosedur kerja, dan tanggung jawab dalam pelaksanaan implementasi kebijakan. Kesesuaian struktur Birokrasi akan memuluskan jalanya kebijakan. Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan cukup dan para implementor mengetahui apa yang harus dilakukannya, serta mempunyai keinginan untuk melakukannya, namun Edward III dalam Widodo (2010:106) menyatakan bahwa “Implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ketidakefisienan struktur birokrasi”. Struktur birokrasi menurut Edward III dalam Widodo (2010:106) mencakup aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya.

#### **2.1.1.1 Unsur-Unsur Implementasi**

Tachjan (2006:28) menjelaskan tentang unsur-unsur dari implementasi kebijakan yang mutlak dan harus ada, yaitu:

- a. Unsur pelaksana Unsur pelaksana adalah implementor kebijakan, sebagai mana yang dijelaskan Dimock dan Dimock dalam Tachjan (2006:28), Pelaksanaan kebijakan merupakan pihak-pihak yang menjalankan kebijakan yang terdiri dari penentuan tujuan dan sasaran organisasional, analisis serta perumusan kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan program, pengorganisasian, penggerakan manusia, pelaksanaan operasional, pengawasan serta penilaian.
- b. Adanya Program Yang Dilaksanakan Suatu kebijakan publik tidak mempunyai arti penting adanya tindakan yang nyata dilakukan dengan berbagai program atau kegiatan. Program atau kegiatan merupakan rencana yang komprehensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan. 3. Target Group Atau Kelompok Sasaran Target group atau kelompok sasaran adalah sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang atau jasa yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan.

### **2.1.1.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi**

Menurut Van Meter dan Van horn dalam Budi Winarno (2007:158), terdapat enam faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu:

- a. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan.
- b. Sumber-sumber.
- c. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaa.
- d. Karakteristik-karakteristik badan-badan pelaksana.
- e. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik.
- f. Kecenderungan para pelaksana.

### **2.1.2 Pengertian Kebijakan Publik**

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan). Kebijakan hanya menjadi pedoman Tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.

Secara umum, kebijakan adalah hal yang digunakan untuk menunjukan sebuah perilaku seseorang untuk menunjukan sebuah perilaku seseorang. Pada dasarnya, terdapat banyak penjelasan yang disertai dengan Batasan atau pengertian mengenai kebijakan lainnya. Kebijakan adalah suatu petunjuk dan Batasan yang dilakukan secara umum. Batasan yang menjadi arah dari sebuah Tindakan yang harus dilakukan serta sebuah aturan yang harus diikuti oleh para pelaku juga pelaksanaan kebijakan, karena sangat penting untuk pengolahan didalam sebuah organisasi. Secara terimology, kebijakan adalah sebuah kewenangan yang dimiliki pemerintah. Kewenangan tersebut dilakukan untuk menjalankan tugas dan fungsinya didalam hubungannya dengan dunia usaha.

Pada dasarnya kebijakan pemerintah di dalam menata kehidupan masyarakat pada banyak aspek kehidupan adalah kebijakan yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat itu sendiri didalam setiap kebijakan public, akan diawali dengan perumusan masalah.

Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, finansial, atau administrative untuk mencapai suatu tujuan eksplisit.

Kebijakan adalah suatu ucapan atau lisan yang memberikan petunjuk umum tentang penentuan ruang lingkup yang memberi batas dan arah umum kepada seseorang untuk bergerak. Secara etimologis, kebijakan adalah terjemahan dari kata (*policy*). Kebijakan dapat juga berarti sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan dapat berbentuk keputusan dipikirkan secara matang dan hati-hati oleh pengambil keputusan dan bukan kegiatan-kegiatan berulang yang rutin dan terprogram atau terkait dengan aturan-aturan keputusan.

Berikut ini adalah beberapa pengertian kebijakan public menurut beberapa ahli :

Menurut Holwet dan M. Ramesh (Subarsono,2005:13) berpendapat bahwa proses kebijakan public terdiri atas lima tahapan yaitu sebagai berikut :

1. Penyusunan agenda, yakni suatu proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah.
2. Formulasi kebijakan, yakni proses penyusunan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah.
3. Pembuatan kebijakan, yakni proses Ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu Tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan.
4. Implementasi kebijakan, yakni proses untuk melaksanakan kebijakan agar mencapai hasil.
5. Evaluasi kebijakan, yakni proses memonitor dan memilih kerja atau hasil kebijakan.



Menurut Abdul Wahab (2005), Kebijakan public adalah suatu Tindakan bersanksi yang mengarah pada tujuan tertentu yang siarahkan pada suatu masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi Sebagian besar warga masyarakat. James E Anderson (Irfan Islamy,2000:17) mendefenisikan kebijakan itu adalah serangkaian Tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Sedangkan Amara Rasasatya menyebutkan bahwa kebijakan adalah suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu suatu kebijakan harus memuat 3 (tiga) elemen, yaitu :

1. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai.
2. Taktik atau strategi dari berbagai Langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan
3. Penyediaan berbagai untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

Solichin Abdul Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, Sclichin Abdul Wahab (2008: 40-50) memberikan beberapa pedoman sebagai berikut :

1. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan.
2. Kebijakan seenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi.
3. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan.
4. Kebijakan mencakup ketiadaan Tindakan ataupun adanya Tindakan.
5. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai.
6. Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun imlieit.
7. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu.
8. Kebijakan meliputi hubungan yang bersifat anatar organisasi dan yang bersifat inta organisasi.
9. Kebijakan public meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci Lembaga - lembaga Pemerintahan.
10. Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subjektif.

Menurut Budi Winarno (2007: 15), Istilah kebijakan (*policy term*) digunakan secara luas seperti pada “kebijakan luar negeri Indonesia”, “kebijakan ekonomi Jepang”, dan atau mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus, seperti misalnya jika kita menyatakan kebijakan Pemerintah tentang debirokratisasi dan geregulsi.

Baik sholin Abdul Wahab maupun Budi Winarno sepakat bahwa istilah kebijakan ini penggunaannya sering dipertukarkan dengan istilah lain seperti tujuan (*goals*) program, keputusan, undang-undang. Ketentuan-ketentuan, standar proposal dan *grand design* (Suharno, 2010 : 11).

Menurut Gerston kebijakan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintahan yang bertujuan untuk memecahkan masalah publik. Proses penentuan pada sebuah kebijakan public mencakup lima tahapan. Diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi sebuah isu kebijakan publik.
2. Melakukan advokasi kebijakan publik.
3. Mengembangkan proposal kebijakan publik.
4. Melaksanakan kebijakan publik.
5. Mengevaluasi kebijakan yang akan dilaksanakan.

### **2.1.3 Pengertian Implementasi Kebijakan Menurut George edward III**

Menurut George C Edward (dalam Subarsono,2005:90)<sup>16</sup>. ada empat faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan yaitu:

#### **1. Komunikasi**

Persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan kebijakan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran supaya meminimalisir distorsi implementasi.

---

<sup>16</sup> A.G Subarsono.2005.Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori Dan Aplikasi.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.Hal 90

Jika tujuan dan sasaran kebijakan tidak jelas atau tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran maka sangat mungkin terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

Secara umum, Edward III (Winarno, 2002:127)<sup>17</sup> membahas tiga indikator dalam proses komunikasi kebijakan yaitu:

- a. Transmisi Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi yaitu adanya salah pengertian (miskomunikasi) yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.
- b. Kejelasan Indikator ini mensyaratkan kebijakan yang diimplementasikan oleh para pelaksana bukan hanya diketahui secara detil tentang pedoman kebijakan, namun juga mengenai kejelasan dari petunjuk teknis dalam melaksanakan kebijakan tersebut.
- c. Konsistensi Perintah yang di berikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsistensi dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Jika perintah yang diberikan sering berubah – ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana dilapangan.

## 2. Sumber Daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, sumber daya financial, dan fasilitas yang dipergunakan. Menurut Edward III (dalam Tangkilisan, 2003:66), sumber daya merupakan hal penting dalam melakukan implementasi kebijakan yang baik<sup>18</sup>.

Indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana sumber daya mempengaruhi implementasi kebijakan terdiri dari :

---

<sup>17</sup> Winarno, Budi. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Median Pressindo. Hal. 127

<sup>18</sup> Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003. Implementasi Kebijakan Publik Transformasi Pikiran George Edward III. Jakarta : Lukman Offset. Hal 66

- a. Staf Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau pegawai (street – level – bureaucrats). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salah satunya disebabkan oleh staf atau pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan, tetapi diperlukan sebuah kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan mampu) dalam mengimplementasikan kebijakan.
  - b. Informasi Dalam mengimplementasikan kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu : pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang ditetapkan.
  - c. Fasilitas Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin mempunyai staf yang mencukupi, mampu dan kompeten, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (prasarana dan sarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.
3. Disposisi (Kecenderungan atau Tingkah Laku)

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implentor seperti komitmen, kejujuran, dan sikap demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sifat atau persfektif yang berbedfa dengan pembuat kebijakan maka proses imlementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Faktor–faktor yang menjadi perhatian Edward III mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari :

- a. Pengangkatan Birokrasi Sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan – hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat – pejabat yang lebih atas. Karena itu pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang – orang yang memilik dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.

- b. Insentif Insentif merupakan salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

#### 4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang paling penting dari setiap organisasi adalah adanya rincian tugas dan prosedur pelayanan yang telah disusun oleh organisasi. Rincian tugas dan prosedur pelayanan menjadi pedoman bagi implementor dalam bertindak. Selain itu struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Pada akhirnya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

#### 2.1.4 Stunting

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan yang dialami anak pada 1000 hari pertama kehidupan akibat kekurangan gizi, infeksi berulang dan stimulasi psikososial yang tidak layak. Tetapi sebenarnya penyebab stunting bukan hanya kurang gizi dalam jangka Panjang saja. Faktor penyebab stunting/gizi kurang bukan hanya karena masalah ekonomi saja pola asuh dan pengetahuan gizi yang mengasuh juga sangat di penting dalam pencegahan stunting pada anak balita.

Berdasarkan kajian yang penulis dapatkan, terdapat beberapa cara untuk mencegah penyakit stunting, diantaranya adalah sang ibu diberi tablet tambah merah, memeriksa kehamilan minimal enam kali, melengkapi imunisasi dasar pada balita, mengikuti program KB (keluarga berencana), mencegah pernikahan usia dini, pemenuhan kebutuhan IMD (Inisiasi Menyusui Dini), ASI eksklusif dan MPASI pada balita, dan yang paling urgent adalah melakukan pengasuhan selama 1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan) balita.

1000 HPK ini sama dengan jangka usia balita 0-2 tahun. Masa-masa tersebut sangat krusial bagi balita karena berpotensi rawan stunting. Metode pola pengasuhan 1000 HPK mencakup 3A yakni “Asah, Asih, Asuh.” Asah untuk kebutuhan stimulasi mental balita, asih untuk kebutuhan emosi dan kasih sayang balita, sedangkan asuh untuk kebutuhan fisik biomedis sebagaimana yang telah dipaparkan pada pernyataan sebelumnya.

Selain itu Pendidikan, hygiene dan sanitasi, infrasturktur juga bisa menjadi salah satu penyebab stunting. Terjadinya stunting pada awal kehidupan anak dapat mengakibatkan adanya kerusakan secara permanen pada perkembangan kognitif yang diikuti oleh perkembangan intelektual dan motorik anak yang kurang optimal. Maka, hal ini dapat berdampak kepada pendapatan, pendidikan, dan produktivitas pada masa dewasa sehingga dapat berdampak kepada penurunan ekonomi. Meskipun Indonesia menjadi negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan terbesar ke-17 di dunia permasalahan mengenai stunting di negara ini masih sangat mengkhawatirkan, sehingga Pemerintah pusat melakukan intervensi penurunan stunting secara terintegrasi dengan memprioritaskan Kabupaten atau kota dalam penanganan stunting. Di Provinsi Sumatra Barat terdapat beberapa Kabupaten atau Kota yang menjadi prioritas penanganan stunting. Salah satunya Kabupaten yang menjadi prioritas penanganan stunting adalah Kabupaten Pasaman.

### **2.1.5 Pengertian Pintar**

Pintar merupakan suatu inovasi yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten Pasaman dalam Kebijakan Penetapan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2019 dalam pencegahan Stunting di Kabupaten Pasaman karena Kabupaten Pasaman ditetapkan sebagai daerah yang menjadi lokus stunting maka Pemerintah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2019 dengan Inovasi Cegah Stunting Dengan Pintar Adapun yang dimaksud dengan PINTAR yaitu:

- a. Periksa kehamilan secara rutin dan bersalin di fasilitas Kesehatan.
- b. Ingat tablet tambah darah untuk ibu hamil dan remaja putri.
- c. Nutrisi yang cukup dengan gizi seimbang.
- d. Tuntaskan ASI Eksklusif sampai bayi usia 6 (enam) bulan.

- e. Ayo imunisasi balita secara lengkap dan gunakan jamban sehat.
- f. Rutin ke posyandu untuk pantau pertumbuhan dan perkembangan balita.

Melalui slogan singkat ini pemerintah Kabupaten Pasaman mengajak seluruh Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Pasaman ikut dalam upaya penurunan stunting.

Salah satu cara Pemerintah mensosialisasikan nya adalah dengan cara sosialisasi sampai ke tingkat puskesmas tingkat puskesmas sosialisasi sampai ketingkat Bidan Desa. Instansi terkait juga sosialisai sampai ke tingkat daerah yang menjadi lokus stunting di Kabupaten Pasaman salah satu daerah percontohan stunting yaitu Kabupaten Bonjol Nagari Ganggo Hilir.

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang dijadikan referensi oleh peneliti dalam menyusun penelitian ini. Oleh karena itu penelitian terdahulu harus relevan sehingga bisa dijadikan pembandingan dan pembeharuan antara peneliti terdahulu dengan peneliti yang akan datang. Penelitian terdahulu yang peneliti pakai sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang berjudul “IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PENURUNAN STUNTING MELALUI EDUKASI KESEHATAN IBU DAN CALON IBU DI DESA WIH SAGI INDAH”. Oleh Muhsin Efendi dkk. Penelitian ini menjelaskan tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah yang mengupayakan agar dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan berbagai kebijakan yang ditempuh. Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) Universitas Gajah Putih yang ditempatkan di Desa Wih Sagi Indah, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah mencoba ikut berperan serta dalam pencegahan masalah stunting melalui kegiatan Implementasi peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 14 Tahun 2018 melalui Edukasi Kesehatan bagi Ibu dan Calon Ibu sebagai upaya Pencegahan Masalah Stunting di Desa Wih Sagi Indah, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, yang ditujukan bagi Ibu yang mempunyai balita dan ibu yang sedang hamil.

Diharapkan dengan kegiatan ini pemahaman masyarakat tentang kesehatan dapat meningkat dan penderita stunting dapat berkurang, sehingga keinginan untuk mewujudkan masyarakat sehat cerdas dan unggul dapat dicapai. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Kedua, peneliti yang berjudul “IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KABUPATEN SERANG NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG PERCEPATAN PENCEGAHAN STUNTING TERINTEGRASI DI KABUPATEN SERANG”. Oleh Siska Rahma Vidianti, dan Ipah Ema Jumianti. Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa penelitian menggunakan teori model implementasi menurut Van Metter dan Van Horn. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sudah berjalan dengan baik, akan tetapi masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Adanya kendala tersebut karena masih tingginya angka prevalensi stunting SSGI di Kabupaten Serang tahun 2022 yakni sebesar 26,4% yang masih jauh dari target yang ditetapkan, pemahaman dan pengetahuan masyarakat yang masih terbatas di beberapa aspek, minimnya ketersediaan alat antropometri di posyandu wilayah puskesmas, masih adanya perilaku masyarakat yang sulit dirubah saat melakukan aktivitas sehari-hari di sekitar aliran sungai dan kurangnya pengawasan terhadap bantuan jamban sederhana.

Ketiga, penelitian yang berjudul “ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN PATI”. Penelitian oleh Aina Shinta Malinda, dan Chatila Maharani. Penelitian ini menggunakan metode Analisis tematik deskriptif dan penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Peneliti ingin mengetahui seberapa baik Peraturan Bupati di Kabupaten Pati digunakan untuk menangani kasus stunting dengan latar belakang tersebut. Tujuan peraturan bupati ini adalah untuk menurunkan angka stunting pada balita di daerah tersebut hingga kurang dari 20%. Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.



Keempat, penelitian yang berjudul “PENCEGAHAN STUNTING PADA ANAK DALAM PERSEPEKTIF ISLAM DI KOTA BANDAR LAMPUNG” oleh Rumadani Sagala dkk. dalam riset yang dipakai pada riset ini diketahui dengan sebutan PAR ataupun Participatory Action Research. Participatory Action Research (PAR) ialah bentuk riset yang mencari pemecahan buat menginteraksikan cara riset dengan cara pergantian social. Hasil dari pengabdian adanya peningkatan pemahaman masyarakat. Peserta kegiatan pendampingan di majelis taklim dan kegiatan Kesehatan dapat memberikan edukasi lanjutan kepada keluarga dan lingkungan masyarakat terkait dengan pencegahan stunting dan Sebagian besar kader posyandu mulai mengimplementasikan hidup Islam dalam aktifitas rutinitas kegiatan. Sosialisasi dari kader posyandu sejalan dengan materi yang didapat dari adanya sosialisasi hidup sehat secara islami yang telah diselenggarakan sebelumnya.

Kelima, penelitian yang berjudul “ IMPLEMENTATION OF SUMENEP REGENT REGULATION NO 14 OF 2019 CONCERNING THE ACCELERATION OF STUNTING MANAGEMENT” oleh Unti Nur Hasinah dkk. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menurut Creswell (2009) merupakan metode yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap berasal dari masalah sosial, yang mana di dalamnya terdapat proses pengajuan pertanyaan kepada narasumber, pengumpulan, analisis, dan menafsirkan makna dari data-data yang diperoleh. Informan dari penelitian ini diperoleh dengan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Kualitas data divalidasi menggunakan teknik triangulasi.

Keenam, penelitian yang berjudul “IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI MANGGARAI TIMUR NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KELURAHAN KOTA NDORA DAN KELURAHAN RANA LOBA KECAMATAN BORONG” Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kelurahan kota Ndora dan Kelurahan

Rana Loba Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian melalui wawancara dan observasi. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dapat berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan studi kepustakaan/dokumen. Teknik pengolahan data dengan editing, coding, tabulasi, dan verifikasi. Teknik analisis data dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu dengan cara menjelaskan atau menguraikan data untuk memperoleh gambaran yang jelas dan objektif dengan memberikan penafsiran yang logis dan benar sesuai dengan fakta yang ada dan atau serta kaidah hukum yang terkait permasalahan penelitian ini.

Ketujuh, penelitian yang berjudul “ANALISIS KEBIJAKAN TENTANG DETEKSI DINI PENANGGULANGAN STUNTING DI KALIMANTAN TENGAH” Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan metode analisis deskriptif. Bahan penelitian atau teknik pengumpulan data menggunakan sumber data sekunder, diantaranya adalah melalui analisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan stunting, salah satunya adalah Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No.26 Tahun 2019 tentang Deteksi Penanggulangan Stunting di Kalimantan Tengah. Data sekunder lainnya adalah studi pustakadari berbagai media online termasuk laporan instansi terkait masalah kejadian stunting khususnya untuk provinsi Kalimantan Tengah. Seluruh sumber data sekunder tersebut kemudian dianalisis dengan berbagai teori berkaitan dengan implementasi kebijakan.

Kedelapan, penelitian yang berjudul “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN STUNTING DI PUSKESMAS PANGKALAN BALAI KABUPATEN BANYUASIN” Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan menggunakan pedoman wawancara mendalam (indepth interview). Dalam hal ini fokus penelitian bertujuan untuk mengetahui tentang implementasi kebijakan penanggulangan kejadian stunting di Puskesmas Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin. Pada penelitian ini informan ditentukan dengan cara Purposive Sampling. Masalah stunting di Indonesia adalah

ancaman serius yang memerlukan penanganan yang tepat. Balita yang mengalami stunting memiliki risiko terjadinya penurunan intelektual, produktivitas dan peningkatan risiko penyakit degeneratif dimasa mendatang. Salah satu kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Palembang terkait penanggulangan kejadian stunting, yaitu melalui Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 49 Tahun 2018 tentang percepatan pencegahan stunting, pengendalian dan penurunan stunting terintegrasi. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kebijakan pemerintah terkait penanggulangan stunting di Kota Palembang.

Hasil penelitian yaitu implementasi kebijakan penurunan stunting sudah dilaksanakan dengan baik sesuai Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 49 Tahun 2018 dan Program Rembuk Stunting oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin bekerjasama dengan seluruh Puskesmas Kabupaten Banyuasin guna untuk Percepatan Penurunan Angka Stunting di Kabupaten Banyuasin, kejelasan kebijakan penanggulangan stunting di Puskesmas Pangkalan Balai telah disosialisasi kepada petugas kesehatan, staf dalam mendukung program penanggulangan stunting di Puskesmas Pangkalan Balai sudah cukup, fasilitas yang tersedia untuk menjalankan program penanggulangan stunting di Puskesmas Pangkalan Balai sudah layak dan sesuai, koordinasi pembentukan komitmen Puskesmas Pangkalan Balai melalui lintas sektor, SOP dalam implementasi kebijakan stunting sudah tersedia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran bagi pihak puskesmas untuk dapat lebih meningkatkan pelayanan stunting.

Kesembilan, penelitian yang berjudul “ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM PENANGANAN STUNTING DI DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA” Penelitian ini merupakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam tentang strategi penanggulangan prevalensi stunting pada anak balita di Provinsi Papua. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Kesehatan Provinsi Papua pada bulan Oktober 2023. Informan terdiri dari empat orang yang dipilih secara purposive sampling, melibatkan Kabid Kesmas, Kasi Kesga dan Gizi, Staf Gizi dari Dinkes Provinsi Papua, serta Kasubid Kesejahteraan Sosial dari Bappeda Provinsi Papua. Instrumen penelitian meliputi pedoman wawancara mendalam dan

observasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif, meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Stunting atau balita kerdil merupakan masalah kesehatan masyarakat jika prevalensinya 20% atau lebih. Prevelasi stunting di Indonesia tahun 2021 dan tahun 2022 masih di atas 20%. Penanganan stunting di Provinsi Papua belum mencapai hasil yang memuaskan dan terjadi peningkatan kasus stunting tahun 2021 sebesar 29,5% dan tahun 2022 meningkat 34,6%. Upaya ini telah dilakukan oleh Dinkes Provinsi Papua, namun pencapaiannya belum maksimal sesuai dengan target yang diharapkan.

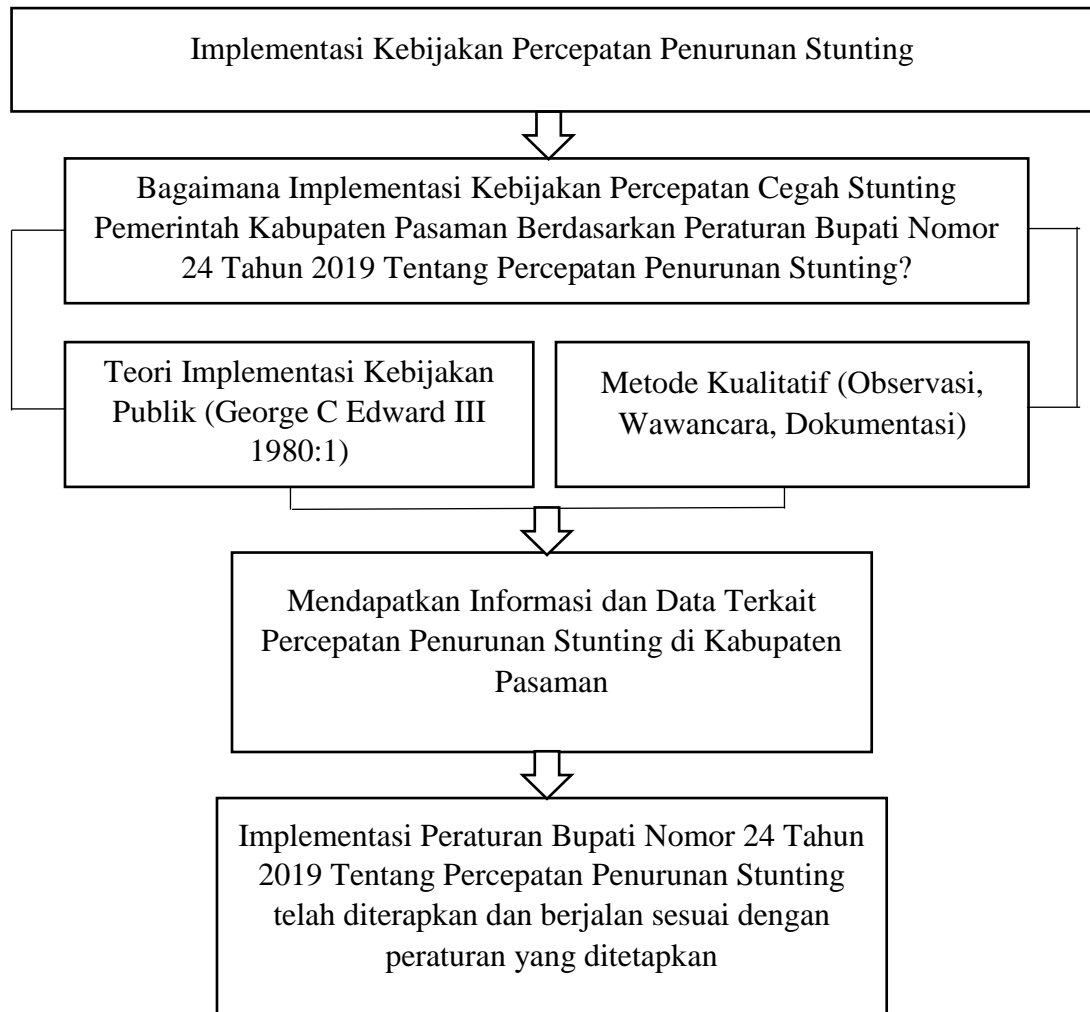
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program penanganan stunting di Dinas Kesehatan Provinsi Papua. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan melibatkan empat informan dari Dinkes Provinsi Papua dan Bappeda Provinsi Papua. Instrumen penelitian menggunakan pedoman wawancara dan dokumentasi, serta hasil dianalisis secara kualitatif. Temuan penelitian dapat dimasukkan ke dalam tiga komponen utama, yakni input, proses, dan output. Pertama, pada komponen input, sumber daya manusia di Dinkes Provinsi Papua, khususnya dari Bidang Kesehatan Masyarakat dengan fokus pada kesehatan keluarga dan gizi masyarakat, dinilai sudah memadai. Namun kekurangannya terutama terdapat pada jumlah petugas gizi di tingkat kabupaten/kota, terutama di puskesmas. Selain itu, sumber dana BOK masih belum teralokasi secara spesifik untuk intervensi spesifik dan sensitif, serta metode/prosedur yang terbatas karena kurangnya sosialisasi buku pedoman di puskesmas. Perluasan sarana dan prasarana juga memerlukan perencanaan yang lebih optimal untuk memenuhi kebutuhan dalam penanganan stunting. Kedua, pada komponen proses, perencanaan dilakukan dengan mencapai penurunan stunting dan alokasi dana BOK dari puskesmas. Namun perencanaan intervensi yang spesifik dan sensitif masih memiliki kekurangan. Pengorganisasian melalui Tim TPPS dinilai belum optimal karena minimnya agenda kerja. Meskipun pelaksanaan program stunting diarahkan sesuai SOP melalui pedoman buku, masih terdapat ruang untuk perbaikan.

Kesepuluh, penelitian yang berjudul “PROGRAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KOTA MADIUN SEBAGAI PEMENUHAN HAK ATAS KESEHATAN” Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Abdulkadir menjelaskan penelitian hukum normatif-empiris merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara *in action* (faktual) pada suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan hukum pada peristiwa hukum *in concreto* sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

Penelitian ini bersifat menggambarkan apa adanya sesuai dengan fakta dan data yang ditemukan dalam mengkaji bagaimana kebijakan publik atau produk hukum dari pemerintah kota Madiun terkait dengan program Percepatan Penurunan Stunting dari tingkat pusat hingga daerah. Teknik analisis data yang digunakan Peneliti adalah teknik analisis data interaktif. Miles & Huberman menjelaskan bahwa bahwa teknik analisis data interaktif ialah teknik analisis data yang terdiri atas empat komponen proses analisis, yaitu, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. Peneliti akan mengkaji kebijakan pemerintah kota Madiun tentang Program Percepatan Penurunan Stunting, data-data yang didapatkan adalah data-data kualitatif yang secara lengkap.

### **2.3 Kerangka Berpikir**

Kerangka berpikir adalah dasar dasar atau sebuah konsep pemikiran peneliti yang menggabungkan antara teori, hasil observasi, fakta, serta kajian pustaka yang dijadikan landasan dalam membuat karya ilmiah. Berdasarkan dari itu maka kerangka berpikir dalam penelitian ini sebagai berikut:



**Gambar 2.1 Kerangka Berpikir**